



**DANA KELURAHAN**  
**Pemkot Tunggu Arahkan Pusat**

JOGJA—Mulai tahun depan, setiap kelurahan di wilayah Jogja bakal menerima Dana Kelurahan sebesar Rp352 juta. Hingga kini, Pemkot Jogja masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan penggunaan dana tersebut.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan sampai saat ini Pemkot masih menunggu petunjuk teknis penggunaan dana kelurahan dari Pusat. Aturan tersebut dinilai penting karena penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut langsung dilakukan oleh Pusat.

"Penggunaan dana kelurahan tidak boleh sembarangan, harus sesuai aturan. Kami masih menunggu juklak juknis [petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis] dari Pusat," kata Haryadi, Selasa (4/12).

Koordinator Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Wilayah III ini juga akan mempertanyakan ke Pusat mengenai kejelasan aturan penggunaan dana tersebut. Menurutnya, pencairan dana kelurahan tersebut merupakan bagian dari perjuangan Apeksi sejak beberapa tahun lalu.

● Lebih Lengkap Halaman 16

**GELONTORAN RUPIAH KE KELURAHAN**

**1 Total Dana operasional kelurahan: antara Rp1,5 miliar sampai Rp1,7 miliar.**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Biaya operasional dari APBD Jogja: antara Rp500 juta hingga Rp1,1 miliar per tahun | Dana hibah dari Pemkot kepada LPMK: antara Rp90 juta hingga Rp150 juta per tahun. | Dana hibah dari Pemkot untuk RT-RW: sekitar Rp130 juta per tahun |
|--|---|--|

**2 Dana Kelurahan (2019): Rp352 juta per kelurahan**

**Ketentuan Pelaksanaan Dana Kelurahan**

- Lurah wajib menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.
- Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat harus melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- Harus melibatkan kelompok masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan.
- Alokasi anggaran minimum 5% dari APBD Jogja setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.

Sumber: wawancara, dlatih

---

**Pemkot Tunggu...**

Hal itu dilakukan karena Dana Kelurahan seperti halnya Dana Desa juga dibutuhkan untuk membangun masyarakat. Pemkot Jogja telah memasukkan tambahan dana kelurahan tersebut dalam APBD Jogja 2019. Dana kelurahan tersebut masuk dalam pos anggaran dana alokasi umum (DAU).

"Dana kelurahan yang dicairkan sebesar Rp352 juta per kelurahan. Di Jogja ada 45 kelurahan. Artinya, total dana kelurahan sekitar Rp15,8 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kadri Renggono.

Sejumlah kelurahan mulai menyusun perencanaan penggunaan dana kelurahan. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan fisik, seperti yang akan dilakukan Kelurahan Cokrodiningratan yakni untuk memperbaiki jalan dan pengerukan saluran air hujan. "Perencanaan yang mungkin dilakukan dengan cepat adalah pekerjaan fisik," kata Lurah Cokrodiningratan, Narotama.

Pada 2020, kata dia, penggunaan dana kelurahan tersebut akan dimanfaatkan lebih luas untuk kepentingan lain di antaranya pemberdayaan masyarakat termasuk pengembangan kampung wisata yang ada di wilayah tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Jogja, Edy Muhammad mengatakan selama ini 45 kelurahan sudah mendapatkan biaya operasional dari APBD Jogja. Masing-masing kelurahan memiliki alokasi berbeda, tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah.

"Jumlahnya per tahun antara Rp500 juta hingga Rp1,1 miliar," kata dia.

Dana tersebut, lanjut Edy, belum termasuk dana hibah dari Pemkot kepada lembaga perwakilan masyarakat kelurahan (LPMK) yang nilainya antara Rp90 juta hingga Rp150 juta. "Juga belum termasuk dana hibah untuk RT-RW yang nilainya sekitar Rp130 juta. Jadi dalam satu tahun masing-masing kelurahan bisa memiliki dana operasional antara Rp1,5 miliar hingga Rp1,7 miliar."

(Abdul Hamid Razak)

| Instansi                  | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Tapem dan Kesra | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. BPKAD                  |              |       |                 |

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005